

Mencari Tata Kelola Terbaik Kampung Tematik

Andi Kurniawati, S.E., M.M.

Akademi Akuntansi Effendiharahap Semarang

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.23 Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah (50241)

E-mail: pamungkas_andi14@yahoo.com

ABSTRACT

The implementation of the thematic village program itself is expected to be of benefit to the community in each kelurahan which is the object of the thematic village and to the local government which includes the RT and RW, the Kelurahan Government and the Municipal or District Government. The benefits for the community in the kelurahan are among others the community can live in a clean and green environment so that it will create a sense of comfort to live in the environment, the activities that arise due to the implementation of the thematic village program will certainly be a positive activity container for the local community so as to minimize the activities which is less useful and makes the security conditions in the neighborhood more conducive, and can bring up potential employment opportunities for the thematic village community. As for the village government, thematic villages will provide benefits such as being able to provide services to the village community in this case the village / kelurahan environmental management, can encourage community participation to care for the surrounding environment, and be able to organize empowerment for the community in the village to encourage social and economic potential so that the village / kelurahan government is able to work in accordance with Law no. 6 of 2014 concerning Villages.

Methods The implementation of this research activity is by identifying problems, coordinating with related agencies and direct observation in the field. The journey process of the thematic village program certainly encounters many problems or obstacles, so solutions must be needed to solve these problems. The author found the condition of several thematic villages that encountered obstacles so that they could not proceed according to plan or even stopped the program in the middle of the road. Obstacles found by the authors of the results of observations in the field, among others, such as current field conditions that are not appropriate as when the inauguration of the thematic village program in the village,

The selection method can be chosen according to the most suitable conditions to be applied. All solutions presented are aimed at encouraging the success of the Thematic Village Program through a good governance system and in accordance with applicable regulations. The governance system of a program is very influential on the success in achieving the planned objectives. Thematic Village as a village economic milestone that can be used as a Village-Owned Enterprise (BUMD) which can further improve the welfare of the community

Keywords: Governance of Thematic Villages

ABSTRAK

Pelaksanaan program kampung tematik sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing kelurahan yang dijadikan objek kampung tematik dan bagi pemerintah daerah setempat yang meliputi mulai dari RT dan RW, Pemerintah Kelurahan serta Pemerintah Kotamadya atau Kabupaten. Manfaat bagi masyarakat di kelurahan tersebut antara lain adalah masyarakat dapat hidup dilingkungan yang bersih dan hijau sehingga akan menimbulkan rasa nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut, adanya kegiatan yang muncul akibat dilaksanakannya program kampung tematik tentu akan menjadi wadah kegiatan yang positif untuk masyarakat setempat sehingga meminimalisir kegiatan yang kurang bermanfaat dan menjadikan kondisi keamanan di lingkungan kelurahan menjadi lebih kondusif, serta dapat memunculkan potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelurahan kampung tematik tersebut. Adapun bagi pemerintah kelurahan, kampung tematik akan memberikan manfaat antara lain adalah dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kelurahan dalam hal ini adalah tata kelola lingkungan desa/ kelurahan, dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, serta mampu menyelenggarakan pemberdayaan bagi masyarakat di kelurahan tersebut untuk mendorong potensi sosial dan ekonomi sehingga pemerintah desa/ kelurahan tersebut mampu bekerja sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metode Pelaksanaan kegiatan penelitian ini adalah dengan identifikasi masalah, koordinasi dengan dinas terkait dan pengamatan langsung di lapangan. Proses perjalanan program kampung tematik tentu menemui banyak masalah atau pun rintangan sehingga harus diperlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Penulis menemukan kondisi beberapa kampung tematik yang menemui hambatan sehingga tidak dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan program ini berhenti ditengah jalan. Hambatan yang ditemukan oleh penulis hasil dari pengamatan di lapangan antara lain seperti kondisi lapangan saat ini yang sudah tidak sesuai seperti saat diresmikannya program kampung tematik di kelurahan tersebut,

Metode pemilihan tersebut dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang paling cocok untuk diterapkan. Seluruh solusi yang dipaparkan bertujuan untuk mendorong tingkat keberhasilan Program Kampung Tematik melalui sistem tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem tata kelola sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kampung Tematik sebagai tonggak perekonomian desa yang dapat dijadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci : Tata Kelola Kampung Tematik

Pendahuluan

Proses perjalanan program kampung tematik tentu menemui banyak masalah atau pun rintangan sehingga harus diperlukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Penulis menemukan kondisi beberapa kampung tematik yang menemui hambatan sehingga tidak dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan program ini berhenti ditengah jalan. Hambatan yang ditemukan oleh penulis hasil dari pengamatan di lapangan antara lain seperti kondisi lapangan saat ini yang sudah tidak sesuai seperti saat diresmikannya program kampung tematik di kelurahan tersebut, contohnya adalah "Kampung Labu" namun sebenarnya di kelurahan tersebut tidak ada labu yang tumbuh atau berbuah. Hambatan lain yang ditemukan penulis seperti kurangnya perhatian, pengawasan sekaligus *managerial* dari program kampung tematik tersebut, contohnya adalah "Kampung Pilah Sampah" namun gudang tempat penampungan dan pemilahan sampah tersebut sudah terbakar hingga saat ini belum ada tindak lanjut dan seperti saling lempar tanggung jawab antara pihak kelurahan dan juga pihak pemerintah kota. Hambatan dan ancaman terbesar dari program ini adalah pengajuan kampung tematik di sebuah kelurahan, namun di lapangan program ini hanya fiktif. Program fiktif ini dapat menjadi peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya seperti dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota ternyata tidak seluruhnya atau hanya sebagian digunakan untuk melaksanakan program tersebut.

Tinjauan Pustaka

Kampung Tematik merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar utamanya pada

peningkatan kualitas lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana dasar pemukiman (Gerbanghebat Kota Semarang, 2016). Adapun program kampung tematik ini memiliki tujuan antara lain:

- Mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh atau perbaikan kondisi lingkungan
- Peningkatan penghijauan wilayah yang intensif
- Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif
- Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat (pemberdayaan)

Pelaksanaan program kampung tematik sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing kelurahan yang dijadikan objek kampung tematik dan bagi pemerintah daerah setempat yang meliputi mulai dari RT dan RW, Pemerintah Kelurahan serta Pemerintah Kotamadya atau Kabupaten. Manfaat bagi masyarakat di kelurahan tersebut antara lain adalah masyarakat dapat hidup dilingkungan yang bersih dan hijau sehingga akan menimbulkan rasa nyaman untuk tinggal di lingkungan tersebut, adanya kegiatan yang muncul akibat dilaksanakannya program kampung tematik tentu akan menjadi wadah kegiatan yang positif untuk masyarakat setempat sehingga meminimalisir kegiatan yang kurang bermanfaat dan menjadikan kondisi keamanan di lingkungan kelurahan menjadi lebih kondusif, serta dapat memunculkan potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelurahan kampung tematik tersebut. Adapun bagi pemerintah kelurahan, kampung tematik akan memberikan manfaat antara lain adalah dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat kelurahan dalam hal ini adalah tata kelola lingkungan desa/ kelurahan,

dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, serta mampu menyelenggarakan pemberdayaan bagi masyarakat di kelurahan tersebut untuk mendorong potensi sosial dan ekonomi sehingga pemerintah desa/ kelurahan tersebut mampu bekerja sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tingkat keberhasilan pemerintahan desa/ kelurahan tentu akan berdampak bagi pemerintahan di tingkat Kotamadya atau Kabupaten. Pemerintahan desa/ kelurahan yang mampu memberikan dampak positif seperti menjadi desa mandiri, desa sentra oleh-oleh, desa wisata dan lain-lain akan mendorong pemerintah kota/ kabupaten untuk memberikan bantuan yang dapat berupa pelatihan, penyuluhan serta bantuan sarana dan prasarana ataupun dana yang semuanya itu akan bermuara menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya harus melihat aspek-aspek yang terkait, salah satunya adalah potensi lokal yang dimiliki lingkungan tersebut. Menurut (Gerbanghebat Kota Semarang, 2016) potensi tersebut dapat berupa:

- Usaha yang dominan dan mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut
- Karakter masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, kearifan lokal)
- Masyarakat dan lingkungan yang sehat
- *Home* industri ramah lingkungan
- Kerajinan masyarakat
- Ciri khas setempat yang lebih kuat/ tidak dimiliki kampung lain dan bisa menjadi *icon* wilayah

Perekonomian desa sebagai salah satu sel atau bagian terkecil dari perekonomian nasional tentunya harus terus diberikan perhatian agar dapat

terwujud peningkatan perekonomian desa yang selanjutnya akan mendorong stabilitas perekonomian nasional.

Program Kampung Tematik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Bagaimana hasil evaluasi program tersebut? Apakah manfaat dan dampak positif sudah dirasakan oleh masyarakat kampung tematik tersebut? Manfaat dan dampak yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kampung Tematik antara lain:

1. Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan (fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang lebih baik, dan tertata.
2. Pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.
3. Mendukung *trademark* wilayah tersebut menjadi *icon*, dapat memberikan pengaruh positif pada warga setempat seperti perubahan *mindset* (pola pikir) dan perilaku warga serta keberdayaan masyarakat.
4. Memberikan pengaruh positif dan daya tarik bagi kampung-kampung lainnya di kelurahan tersebut maupun kelurahan lainnya agar terpicu dan terpacu untuk mewujudkan tematik serupa.
5. Munculnya titik–titik kunjungan baru di setiap kecamatan/ kelurahan yang tidak semuanya tersentral di tingkat Kota (terbangunnya sentra-sentra, rumah galeri) yang mendukung pengembangan potensi dan *icon* Kota Semarang.
6. Menggugah para pemberi CSR untuk mereplikasi Kampung Tematik di wilayah lain.



Program Kampung Tematik Kota Semarang
(Pemkot Semarang, 2016)

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari perumusan masalah sebelumnya, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan berupa :

1. Identifikasi masalah, dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan solusi untuk mendapatkan sistem tata kelola kampung tematik yang paling tepat
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait Kota Semarang, sebagai wujud tanggung jawab ketika akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, serta mengajukan izin dan survei lapangan ke Kantor Kelurahan di Kota Semarang yang akan dijadikan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang dapat diberikan oleh penulis agar program kampung tematik dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat adalah adanya pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Pemerintah Desa yang ikut mengatur (*orginzing/ managerial*) dan mengawasi (*controlling*). Tugas dari pihak tersebut antara lain:

a. Mengatur (*Orginizing/ Managerial*)

Tanggung jawab pihak ini adalah mengatur dan mengorganisasikan seluruh elemen yang terlibat serta mengelola semua potensi yang dapat menjadi aspek pendorong agar dapat mencapai tujuan dari program kampung tematik. Pihak ini memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan perencanaan (*planning*) tentang program kerja dan waktu pencapaian sesuai dengan target tujuan kampung tematik masing-masing kelurahan.
2. Menjadi mediator antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa dalam berkomunikasi.
3. Memimpin program dan berhak memilih masyarakat kelurahan tersebut untuk menjadi pengurus Program Kampung Tematik yang selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.
4. Mengatur dan mengkoordinir tugas masing-masing anggota.
5. Melakukan pelatihan, konseling dan menjaga tingkat kedisiplinan anggota untuk mencapai tujuan program kampung tematik.
6. Mengatur keuangan didalam program kampung tematik.
7. Menjaga kualitas dari program kampung tematik di kelurahan tersebut.
8. Menjadi pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan yang selanjutnya dikoordinasikan kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa.
9. Mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan program kampung tematik pada kelurahan tersebut.

b. Mengawasi (*Controlling*)

Tanggung jawab pihak ini adalah mengawasi seluruh kegiatan program kampung tematik mulai dari

perencanaan, pelaksanaan hingga produk akhir dari program tersebut. Pihak ini memiliki tugas antara lain:

1. Mengawasi setiap aliran dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa untuk program kampung tematik.
2. Mengkoordinasikan setiap masalah yang timbul pada saat pelaksanaan program kampung tematik.
3. Mengawasi seluruh kegiatan anggota yang terlibat dalam program.
4. Mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan beserta kendala yang dialami pada saat pelaksanaan program kampung tematik minimal 1 bulan sekali.

Pihak yang memiliki tugas diatas, memiliki tanggung jawab kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Desa dengan tujuan agar Program Kampung Tematik dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan program ini tentu akan mendorong peningkatan perekonomian desa sehingga masyarakat desa/ kelurahan tersebut dapat merasakan manfaat dari program ini.

Sistem Tata Kelola Kampung Tematik

Peningkatan perekonomian desa tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian kota/ kabupaten sehingga seluruh peningkatan perekonomian ini berdampak dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Hal ini juga akan menunjang perekonomian nasional, karena dengan berkurangnya pengangguran adalah salah satu aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan pihak yang dapat mengatur dan mengawasi tata kelola program kampung tematik tersebut dapat dilakukan dengan

beberapa cara. Penulis memberikan beberapa cara seperti skema dibawah ini.

A. Ditunjuk oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten

Pihak pengatur dan pengawas program kampung tematik adalah mereka yang dianggap oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten mampu dan berkompeten dalam bidang tersebut dan kemudian ditunjuk oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Pemilihan dengan metode ini akan lebih memudahkan Pemerintah Kota dalam mengontrol seluruh kegiatan sesuai dengan rencana, termasuk juga dalam hal keuangan, fasilitas maupun seluruh bantuan yang diberikan agar program dapat berjalan sesuai rencana. Kelemahan pemilihan menggunakan metode ini adalah kemungkinan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak yang dipilih pemerintah kota sebagai pengatur dan pengawas dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat, hal ini akan dapat menyebabkan *misscommunication* atau salah paham yang berakibat tidak berjalannya kegiatan sesuai program.

B. Ditunjuk oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan

Pihak pengatur dan pengawas program kampung tematik adalah mereka yang dianggap oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan mampu dan berkompeten dalam bidang tersebut dan kemudian diusulkan kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Pemilihan dengan metode ini akan memudahkan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan seluruh kebutuhan untuk kegiatan dalam program tersebut karena pihak yang dipilih adalah mereka yang sudah mengenal karakter Pemerintah Desa sehingga proses

berjalannya kegiatan dapat berjalan. Kelemahan pemilihan menggunakan metode ini adalah kemungkinan terjadi penyelewengan bantuan yang berupa dana, fasilitas dan pelatihan penunjang program kampung tematik untuk kepentingan salah satu pihak.

C. Seleksi Terbuka (*Open Recruitment*)

Pemilihan dengan metode seleksi terbuka/ *open recruitment* adalah dengan membuka pendaftaran bagi mereka yang tertarik dengan tugas dan tanggung jawab seperti yang telah dipaparkan. Pengumuman akan dilakukan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten dan Pemerintah Desa/ Kelurahan sehingga memungkinkan siapa saja untuk dapat terlibat menjadi pengatur dan pengawas program kampung tematik namun tetap memiliki tugas dan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. Bagi para pendaftar kemudian dilakukan tes atau ujian yang menyangkut tentang kemampuan dan kompetensi dalam hal *managerial* dan *controlling* sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat. Kelebihan pemilihan dengan metode ini adalah mereka yang terpilih tidak memiliki kepentingan kecuali bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga semua pihak fokus untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Kelemahan dari pemilihan dengan metode ini adalah kemampuan dan kompetensi sangat bergantung terhadap kualitas para pendaftar sehingga jika pendaftar hanya sedikit di khawatirkan kompetensi pendaftar belum memenuhi kriteria.

D. Mitra Kerjasama (Pihak Ketiga)

Pemerintah Kota/ Kabupaten serta Pemerintah Desa/ Kelurahan mengajak bekerja sama dengan pihak ketiga yang

dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut yang selanjutnya disebut mitra kerjasama. Metode ini adalah metode pemilihan dengan mempertimbangkan faktor kompetensi/ kemampuan dibidang pengaturan (*managerial*) dan pengawasan (*controlling*), faktor menghindari tarik-ulur kepentingan antara Pemerintah Kota/Kabupaten dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan, serta tingkat profesionalisme mitra kerjasama yang dapat juga menjadi aspek pendorong berhasilnya Program Kampung Tematik. Metode dengan mitra kerjasama ini juga memiliki kelemahan yaitu kemungkinan terjadinya wanprestasi antara pihak Pemerintah Kota, Pemerintah Desa, Mitra Kerjasama maupun anggota masyarakat yang menjadi bagian dari program tersebut yang dapat menyebabkan terhambatnya program.



Kesimpulan

Metode pemilihan sistem tata kelola kampung tematik dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang paling cocok untuk diterapkan. Seluruh solusi yang dipaparkan bertujuan untuk mendorong tingkat keberhasilan Program Kampung Tematik melalui sistem tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem tata kelola sebuah program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kampung Tematik sebagai tonggak perekonomian desa yang dapat dijadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) yang selanjutnya mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 331 ayat 4(a) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daftar Pustaka

Gerbanghebat Kota Semarang, 2016

*Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang
Desa*

*Undang-Undang No. 23 tahun 2004
tentang Pemerintahan Desa*